

## BAB II

### HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Harta Bersama dan Ruang Lingkupnya

##### 1. Pengertian Harta Bersama

Istilah harta bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan telah dikukuhkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembakuan itu dimaksudkan agar nama yang bersifat umum melalui pendekatan *linguistik* dapat dimengerti oleh semua lingkungan masyarakat dari berbagai suku dan adat kekeluargaan di Indonesia, karena sebelum KHI membakukan istilah tersebut, konsep harta bersama telah tumbuh dan berkembang di berbagai daerah Indonesia sesuai dengan lingkungan adatnya, karena itu banyak pula ditemukan istilah harta bersama yang berasal dari berbagai lingkungan adat setempat, dalam masyarakat Aceh misalnya, dikenal dan dipergunakan istilah *hareuta sihareukat*. Dalam masyarakat Melayu lebih populer dengan sebutan *harta syarikat*. Sedangkan pada masyarakat Jawa diistilahkan dengan *gono-gini* dan banyak lagi istilah-istilah lain yang digunakan, seperti harta *raja kaya* dan lain sebagainya.



Sebelum kelahiran KHI, pemakaian berbagai istilah-istilah<sup>1</sup> tersebut masih terus berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan lingkungan adat masing-masing. Bahkan menurut Yahya Harahap, penggunaan berbagai istilah tersebut masih mewarnai praktek peradilan.<sup>2</sup> Pengadilan di daerah Jawa-Madura lebih suka menggunakan istilah gono-gini. Pengadilan di Aceh masih tetap dipengaruhi istilah dari lingkungan adat mereka sehingga praktek pengadilan masih lebih cenderung mempergunakan istilah harta syarikat dari pada harta bersama, begitu juga di daerah Melayu. Di samping itu, pengertian tersebut sering diistilahkan dengan harta pencaharian bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan.

Ditinjau dari segi pandangan pakar hukum Adat, dapat dikemukakan pendapat R. Vandijk tentang harta bersama yakni gono-gini.<sup>3</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tentang istilah-istilah yang dipergunakan adat menurut lingkungan hukumnya di Indonesia dapat dilihat dalam karya Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 41-43.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 190), h. 299.

<sup>3</sup> Moeh. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* (Bandung: Diponegoro, 1991), h. 99.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, 1988), h.299.



Di dalam kamus hukum, pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri, selama perkawinan.<sup>5</sup>

Selanjutnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 November 1956 No. 5/K/SIP/1956 dapat dipahami bahwa harta bersama itu adalah segala harta yang diperoleh selama perkawinan.<sup>6</sup> UU No. 1 Tahun 1974 dalam bab VII pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dari beberapa istilah dan definisi di atas, tampaknya sesuai dengan pengertian harta bersama sebagaimana yang terdapat dalam KHI. Dalam Ketentuan Umum Buku I pada bab I pasal 1 point f disebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa uraian dan pengertian harta bersama tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah perolehan, hasil dari usaha, karya suami isteri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat atas nama siapa harta itu terdaftar.

---

<sup>5</sup> Andi Haikal, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia, t.th.), h. 232.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 300.

<sup>7</sup> Pagar, *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama* (Medan: IAIN Press, 1995), h. 485.



Pernyataan tersebut mempertegas klausul “karya suami isteri dalam perkawinan” untuk terwujudnya harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu didaftarkan atau dengan kata lain bukanlah nama orang yang terdaftar itu saja yang berhak terhadap harta kekayaan perkawinan, tetapi suami isteri mempunyai hak yang sama. Dengan adanya pengertian harta bersama tersebut tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami isteri, seperti harta bawaan, harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, hibah, sedekah, warisan atau yang lainnya.

## 2. Ruang lingkup Harta Bersama

Yang dimaksud dengan ruang lingkup harta bersama yaitu uraian yang memberikan penjelasan bagaimana cara menentukan apakah suatu harta termasuk atau tidak dalam kategori sebagai obyek harta bersama antara suami istri dalam suatu perkawinan. Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun yurisprudensi, memang telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, namun secara *in concreto* tidaklah sesederhana itu dalam penerapannya.

Menurut analisa M. Yahya Harahap melalui pendekatan yurisprudensi dan putusan pengadilan, ada 5 (lima) patokan yang menentukan suatu harta benda termasuk dalam lingkup harta bersama.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditbinbapera dan Yayasan al-Hikmah, 1993), h. 169.



Pertama, adalah harta yang dibeli bersama perkawinan. Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk dalam kategori objek harta bersama atau tidak adalah ditentukan berdasarkan pembelian.<sup>9</sup> Jadi, setiap pembelian suatu barang yang dilakukan selama dalam ikatan perkawinan, maka harta atau barang tersebut menjadi harta bersama. Hal yang demikian tanpa mempersoalkan, apakah isteri atau suami yang membeli, apakah harta itu tercatat/terdaftar atas nama suami atau isteri. Dengan kata lain, apa saja yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan otomatis menjadi harta bersama. Perlu pula ditegaskan, barang yang dibeli dengan menggunakan harta bawaan tidak termasuk harta bersama.

Kedua, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.<sup>10</sup> Untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama adalah ditentukan oleh asal usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun sesudah terjadi perceraian.

Gambaran tentang patokan kedua ini adalah misalnya suami isteri mempunyai simpanan di bank yang dikuasai suami atau istri sebagai harta bersama, kemudian terjadi perceraian, tapi tidak sempat dibagi harta

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 303.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 304.



bersama tersebut. Maka jika suami atau isteri yang menguasai uang simpanan tersebut membelikan suatu barang atau membangun rumah, maka barang yang dibeli atau bangunan itu menjadi harta bersama.

Ketiga, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.<sup>11</sup>

Patokan yang ketiga ini adalah sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni bahwa semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan adalah harta bersama. Namun patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan melalui pembuktian. Sebab hak kepemilikan bisa dialihkan berdasar atas hak pembelian, warisan atau hibah.

Keempat, penghasilan harta bersama dan harta bawaan.<sup>12</sup> Patokan keempat ini menentukan bahwa baik penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, maupun penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami atau isteri. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namaun harta pribadi itu tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Dengan kata lain, barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya, jatuh menjadi harta bersama.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 305.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 306.



Kelima, segala penghasilan pribadi suami isteri.<sup>13</sup> Patokan yang kelima ini menentukan bahwa sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami isteri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama.

Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami isteri tidak menentukan lain yang didasarkan atas perjanjian perkawinan.

Dengan adanya pengertian tentang harta bersama tersebut tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami isteri, seperti harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, hibah, sedekah, warisan atau lainnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti ada tiga harta pada sebuah ikatan perkawinan dalam perspektif KHI yakni:

1. Harta bawaan, yang dimaksud ialah harta yang diperoleh suami isteri pada saat atau sebelum melakukan perkawinan, dapat dikatakan bahwa harta tersebut sebagai milik asli dari suami atau isteri. Pemilikan terhadap harta bawaan (harta pribadi) dijamin keberadaannya secara yuridis oleh hukum perkawinan.
2. Harta pribadi, yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau isteri selama perkawinan berlangsung sebagai hadiah, hibah, wasiat, atau warisan yang diperoleh secara pribadi terlepas dari soal perkawinan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 171.

<sup>14</sup> Pagar, *Himpunan*, h. 508.



3. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, baik diperoleh lewat perantaraan isteri maupun lewat perantaraan suami. Harta ini diperoleh sebagai "hasil karya" dari suami isteri dalam kaitan dengan perkawinan.

Pada harta bersama terdapat pengertian yang menonjol yaitu bahwa perolehannya atas hasil karya suami isteri dan dalam masa perkawinan. Dua syarat ini adalah pengertian secara kumulatif dalam harta bersama. Berbeda dengan harta bawaan, yaitu harta tersebut telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta pribadi yang diperoleh secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan.

Menurut KHI, harta bersama dapat berupa benda berwujud meliputi; benda-benda bergerak, benda-benda tidak bergerak dan surat-surat berharga ataupun harta bersama yang tidak berwujud seperti hak dan kewajiban. Seluruh harta tersebut dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya,<sup>15</sup> yang bertanggung jawab menjaga harta bersama adalah suami, begitupun isteri tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya terhadap harta tersebut bersama-sama suaminya.

Sebagaimana pertanggung-jawabannya, maka hak antara suami atau istri terhadap harta bersama adalah sama. Karena itu suami atau

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 509.



isteri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain<sup>16</sup>. Begitu juga dalam membayar hutang suami atau isteri, tidak boleh dibebankan kepada harta bersama, tetapi kepada harta masing-masing. Namun bila hutang tersebut dilakukan untuk kepentingan keluarga, dapat dibayar dengan harta bersama. Jika harta bersama tidak mencukupi, ditambahi dengan harta pribadi suami baru dengan harta isteri<sup>17</sup>.

Dalam kasus suami beristri lebih dari seorang, harta bersama suami dengan isteri-isterinya terpisah dan berdiri sendiri. Sedangkan pemilikan harta bersamanya dihitung sejak saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

## B. Alasan Pelembagaan Harta Bersama dan Pendekatan Konstruksi Hukumnya

### 1. Alasan Pelembagaan Harta Bersama

Apabila dilihat ketentuan perundang-undangan di Indonesia tentang lembaga harta bersama, paling tidak ada empat aturan yang bisa dijadikan rujukan yakni: UU No. 1/1974 pada bab VIII pasal 35-37, KHI pada bab XIII pasal 85-97, Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara

---

<sup>16</sup> Pagar, *Himpunan*, h. 509.

<sup>17</sup> Pasal 93 KHI. Yang dimaksud dengan hutang yang tidak dapat dibebankan pembayarannya kepada harta bersama pada pasal ini (ayat 1) adalah hutang suami-isteri sebelum perkawinan dilangsungkan atau seperti deskripsi di bawah ini: Atas namanya, suami atau isteri menghutang uang dari bank untuk mengembangkan perusahaan adik kandung suami atau isteri. Jika terjadi perceraian sebelum hutang tersebut lunas, maka para pihak dapat mempertahankan bahwa harta bersama tidak dapat dikurangi untuk membayar hutang tersebut, sebelum harta bersama itu dibagi dua.



lain pasal 119 dan hukum adat. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, aturan yang mengikatnya secara yuridis dalam kasus perkawinan adalah UU No. 1/1974 dan KHI.<sup>18</sup>

Bila dirujuk kepada UU No. 1 Tahun 1974, pembagian harta kekayaan jika terjadi perceraian antara suami isteri, tampaknya tidak memberi patokan penyelesaian yang pasti, artinya kepada para pihak diberikan kebebasan memilih penyelesaian menurut hukumnya masing-masing.<sup>19</sup>

Konsekuensi dari "kebebasan memilih" pada pasal 37 UU. No. 1 Tahun 1974 tersebut akan memberikan kesulitan penyelesaian sengketa harta bersama dari suatu pasangan perkawinan antar suku. Karena adat yang diberlakukan tentang pembagian harta bersama memiliki pluralitas aturan. Ada daerah yang membaginya sama antara suami isteri, ada yang satu banding dua dan ada pula daerah yang membedakan lagi antara cerai hidup dengan cerai mati, apakah suami isteri itu punya anak atau tidak.<sup>20</sup>

Pasal tersebut juga memberikan "kebebasan memilih" kepada suami isteri dalam menyelesaikan pembagian harta bersama mereka, apakah menurut hukum Adat, hukum Agama, hukum Perdata atau

---

<sup>18</sup> Berdasarkan pada UU No. 7/1989, bab III pasal 49 ayat 1 dan 2 serta Keputusan Menteri Agama RI. No. 154 tahun 1991 pada ketetapan kedua. Lebih lanjut lihat Pagar, *Himpunan*, h. 256 dan 483.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 37 UU No. 1/1974, Pagar, *Himpunan*, h. 43.

<sup>20</sup> Lihat Ismuha, *Pencarian Bersama*, hal. 45-47.



hukum-hukum lainnya,<sup>21</sup> dimana ketentuan antar hukum tersebut memiliki perbedaan dalam menyelesaikan pembagiannya. Menurut hukum perdata, pembagian harta bersama suami isteri adalah dibagi dua antara suami isteri tanpa mempersoalkan dari pihak mana barang itu diperoleh.<sup>22</sup> Dengan alasan demi ketertiban terhadap perbedaan di atas, adalah suatu keniscayaan untuk melembagakan tradisi yang terus menerus hidup di masyarakat tersebut menjadi salah satu materi KHI. Karena alasan inilah KHI mempertegas kedudukan dan pembagian harta bersama bagi umat Islam Indonesia.

Dari paparan di atas, paling tidak ada dua pertimbangan yang dapat dijadikan alasan mengapa harta bersama dilembagakan dalam KHI. Pertama, nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang seharusnya diantisipasi dan diangkat ke dalam KHI. Dalam hal ini, lembaga harta bersama merupakan suatu tradisi yang telah mengakar, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kedua, bahwa nilai-nilai dan norma adat dalam konteks lembaga harta bersama nyata-nyata membawa kemaslahatan, ketertiban, keadilan dan kerukunan dalam kehidupan

---

<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan penjelasan UU No. 1/1974 bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing adalah hukum agama, adat dan hukum-hukum lainnya. Arso Sosroatmodjo, *Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III, 1981), h. 111.

<sup>22</sup> Pasal 119, 128, dan 129 KUH Perdata, lebih lanjut lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 47 dan 49.



masyarakat Islam Indonesia dalam konteks kekeluargaan. Karena itulah, pluralitas aturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harus dipertegas dalam KHI.

## 2. Pendekatan Konstruksi Hukumnya

Konstruksi hukum adalah pemberian bentuk kepada sekumpulan peraturan hukum secara logis, untuk memecahkan masalah nyata dalam praktek, termasuk di dalamnya fiksi, interpretasi, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa literatur fikih Islam tidak mengenal adanya lembaga harta bersama. Status lembaga harta bersama muncul dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perlu adanya suatu konstruksi hukum untuk mengkaji eksistensi (keberadaan) harta bersama dalam kajian hukum Islam.

Dalam menyoroti konstruksi hukum terhadap harta bersama menurut pandangan hukum Islam ada dua alternatif yang menjadi kajian yaitu; Pendekatan kompromistis dengan hukum Adat dan Menggolongkan harta bersama dengan *syirkah*.

### a. Pendekatan kompromistis dengan hukum Adat

Dalam perumusan KHI, para perumusny telah melakukan berbagai metode dan pendekatan. Salah satu pendekatan yang dilakukan

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia, t.th.), h. 246.



adalah pendekatan kompromistis dengan hukum Adat.<sup>24</sup> Perbincangan tersebut menjadi wacana disini, karena tema kajian dalam bab ini adalah konstruksi hukum yang dirumuskan dalam KHI tentang harta bersama nampaknya dinilai sebagai pengejawentahan dari konsep '*urf*' yang identik dengan hukum Adat.<sup>25</sup> Karena itu, adalah suatu keharusan untuk mengkaji jenis pendekatan ini.

Perumusan KHI melalui pendekatan kompromistis dengan hukum Adat paling tidak mempunyai dua sumber pemikiran integral yakni; *sosiologis-historis* dan *praktis-filosofis*. Yang dimaksud dengan *sosiologis-historis* adalah KHI dirumuskan dari kondisi sosial umat Islam Indonesia dalam perspektif kesejarahannya. Sedangkan *praktis-filosofis* adalah bahwa KHI memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam perspektif sebuah *qanun*. Di samping itu, legitimasi dasar pemikiran tersebut tentu tidak ingin terputus dari mata rantai perumusan dan penerapan hukum Islam seperti yang telah dipraktekkan umat Islam di pentas sejarah yurisprudensinya.

Dua dasar pemikiran di atas, dirangkum dari beberapa kerangka aktivitas perumusan sebuah *qānūn*. Kerangka tersebut antara lain adalah

---

<sup>24</sup> Menurut M. Yahya Harahap ada empat pendekatan dalam upaya merumuskan KHI yakni: Sumber utama Qur'an dan Sunnah, Mengutamakan Pemecahan Problem Masa Kini, *Unity and Variety* dan terakhir Pendekatan Kompromistis dengan Hukum Adat. Lebih lanjut lihat tulisan beliau, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam *Mimbar Hukum*, No. 5 Tahun III, al-Hikmah dan Ditbinbapera, Depag RI, 1991, h. 21.

<sup>25</sup> *Ibid.*



bahwa dalam masyarakat Indonesia ada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan yang terus menerus berlaku dan dipraktekkan dalam tatanan kehidupannya. Karena itu harus diantisipasi dan diangkat ke dalam KHI, agar aturan tersebut tidak tercerabut dari akar sosiologisnya.<sup>26</sup> Hal ini sesuai pula dengan kondisi historis masyarakat Indonesia, dimana jauh sebelum kedatangan Islam telah hidup dan diterapkan apa yang disebut dengan hukum Adat.

Selanjutnya secara *praktis-filosofis*, KHI diharapkan dapat memberi solusi hukum yang kreatif terhadap nilai dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, walaupun nilai dan norma itu tidak dijumpai aturannya secara tegas dalam Alqur'an dan as-Sunnah<sup>27</sup>, dengan kata lain, hukum Islam harus mampu memaksimalkan fungsinya sebagai *social engineering*, *social control* dan *legitimacy* secara utuh dan proporsional.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 39. Lihat juga tulisan H.M. Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 4. Tahun II, Al-Hikmah dan Ditbanbapera, Depag RI, 1991, h. 21.

<sup>27</sup> Harahap, *Informasi*, h. 21.

<sup>28</sup> Apabila hukum dilihat sebagai sebuah sarana pengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat, ada kecenderungan untuk menempatkan hukum pada tiga fungsi utama yakni; pertama hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Kedua, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan sering disebut hukum sebagai alat untuk mengadakan rekayasa sosial (*social engineering*) dan ketiga, hukum dapat juga berfungsi sebagai alat untuk memperlancar interaksi sosial (*legitimacy*). Ketiga fungsi ini bisa berdiri sendiri, bisa pula diterapkan dalam satu kaitan. Lebih lanjut lihat Mura P. Hutangalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Ind Hill co., Cet. I, 1985), h. 10-11. Bandingkan dengan A. Triyatna, *Islam dan Rekayasa Sosial*, dalam *Ulumul Qur'an*, No. 5 dan 6, Vol. V, 1994, h. 63.



Untuk melakukan pendekatan kompromistis dengan hukum Adat, sebenarnya tidak hanya terbatas pada penyerapan atau pengambilan adat kebiasaan ke dalam materi hukum Islam, tetapi juga mencakup upaya pengintegrasian dan pengembangan antara nilai-nilai hukum Islam yang telah ada *naş-nya* dengan nilai-nilai hukum Adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dimaksudkan agar materi *qānūn* itu lebih dekat dengan kesadaran masyarakat dan berorientasi kepada nilai-nilai syari'at Islam. Sikap dan langkah demikian dapat dikatakan dalam suatu ungkapan mengislamisasikan hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat ke dalam Islam.<sup>29</sup>

Selanjutnya, materi KHI diharapkan mampu memberikan rasa aman, tertib dan rukun dalam hidup dan kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Adalah suatu hal yang tak mungkin ideal, sebuah aturan dapat mencapai fungsi di atas, apabila aksentuasi kerakyatan yang merangkum tradisinya tidak diperhatikan secara serius.

Di samping itu upaya yang dilakukan sehubungan dengan kompromistis antara hukum Islam dan hukum Adat dalam konteks perumusan KHI, dalam hal ini tentang harta bersama bukan tanpa

---

<sup>29</sup> Dalam sejarah perumusan hukum Islam, *mufti* berfungsi sebagai penasehat pengadilan dan berwenang menyelesaikan kasus-kasus individual baik resmi maupun swasta. Fatwa-fatwa inilah yang dijadikan para hakim sebagai rujukan dalam menyelesaikan perkara. Dalam kumpulan fatwa tersebut dapat disaksikan pergumulan intelektual seorang mufti dengan adat kebiasaan setempat yang sedikit demi sedikit diislamisir dan diintegrasikan ke dalam Hukum Islam. Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1984), h. 110-111 serta lihat juga, M. 'Azzam, *Al-Maqasid as-Syari'ah Fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Al-Azhar: Darul Bayan, 2001), h. 193.



memperhatikan aturan yang dirumuskan dalam tradisi yurisprudensi Islam, yakni: *al-'ādat muḥakkamah*.<sup>30</sup> Karena itu adalah benar untuk tidak mengklaim bahwa tata hukum Islam membutuhkan perangkat hukum Adat dalam rangka melengkapi dan membangun tata hukumnya.<sup>31</sup>

b. Menggolongkan harta bersama dengan *syirkah*

Pendekatan kedua dengan menggolongkan harta bersama kepada pembahasan *syirkah*. *Syirkah* dalam kajian fikih ada dua; *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-'uqūd*. Harta bersama dikelompokkan kepada *syirkah al-'uqūd*, yakni *syirkah* yang terjadi sebagai konsekuensi dari akad yang disepakati dua orang atau lebih. Bentuk *syirkah al-'uqūd* tersebut terdiri dari *syirkah al-inān*, *syirkah al-mufāwāḍah*, *syirkah al-'abdān/amal*, *syirkah al-wujūh*.

Jika harta bersama diidentikkan dengan *syirkah*, maka sesuai dengan konteks keindonesiaan menurut Ismail Muhammad syah harta bersama termasuk ke dalam bentuk *syirkah al-'abdān al-mufāwāḍah*.<sup>32</sup>

Selanjutnya menurut Sayuti Talib, *syirkah* antara suami isteri selama masa perkawinan digolongkan kepada *syirkah al-'abdan*.<sup>33</sup>

Bila dicermati dengan seksama tentang bentuk-bentuk *syirkah* dari segi kajian fikih sebagaimana uraian tersebut di atas, penulis berpendapat

<sup>30</sup> Harahap, *Informasi*, h. 40. Lihat juga as-Suyūṭy, *al-Aṣḥab wa an-Nazā'ir* (Mesir: Maktabah Tijāriah, 1993), h. 45.

<sup>31</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 150.

<sup>32</sup> Ismuha, *Pencarian*, h. 78.

<sup>33</sup> Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Pers, 1986), h. 84-85.



bahwa pada kondisi kehidupan pasangan rumah tangga antara suami isteri dengan semangat kerja keras sehingga menghasilkan kekayaan, maka posisi harta bersama dapat digolongkan kepada *syirkah al-'abdān*<sup>34</sup>. Dalam kenyataan dimana antara suami dan isteri sama-sama memiliki modal yang dikembangkan dan dikelola secara bersama-sama sehingga menghasilkan kekayaan bersama, maka posisi kekayaan sebagai harta bersama dalam posisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *syirkah al-'inān*.

Namun disisi lain kondisi aktivitas kehidupan pasangan rumah tangga bisa saja tidak dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau setidaknya tidaknya tidak relevan dengan *syirkah*. Keberhasilan dalam mengatur rumah tangga tidak dapat dikategorikan dalam *syirkah* tetapi bentuk tersendiri sebagai kurnia dan berkah perjanjian suci karena mematuhi ajaran Allah swt. Walaupun isteri tidak bermodal dan juga tidak bekerja atau berusaha, namun dari sikap perilakunya tetap menjaga kewajibannya

---

<sup>34</sup> Adapun literatur-literatur yang digunakan dalam pembahasan *syirkah* pada penelitian ini adalah, Ibrahim al-Jamāl, *Fiqh al-Muslim 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, jilid 2 (Beirut: Dār al-Jil, 1992), h. 85-90, Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatāwa asy-Syaikh al-Islām Ahmad Ibnu Taimiyah*, jilid 30 (Rabat: Maktabah al- Ma'ārif, 1981), 74-82, Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, jilid 2 (Mesir: Mustāfa al-Bāby al-Halaby, 1339 H), h. 210-214, Muhammad Syarbaini, *Mugny al-Muhtāj 'Ilā Ma'rifat al-Ma'āni Alfāz al-Minhaj*, jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikri, tt), h. 211-216, Zakaria Anshary, *Syarh al-Bahjah*, jilid 3 (Rabat: Maṭba'ah Maimaniyah, tt), h. 66-72. Sayid Ali Fikri, *Al-Mu'amalah al-Maddiyah wa al- Adabiyah*, jilid 1 (Kairo: Mustāfa al-Bāby al-Halaby, 1938), h. 204- 241. Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, jilid 3 (Mesir: Maktabah Tijāriyah, tt), 42-95, Al-Kasany, *Badā'i'u as-Ṣanā'i'u*, jilid 6 (Mesir: Maṭba'ah Jamāliyah, tt), h. 57-74, Ibnu Qudāmah, *Al-Mugny*, jilid 5 (Beirut: Dār al-Fikri, tt), 1-78.



selaku isteri, maka walaupun hanya suami yang bekerja keras hasilnya tetap menjadi harta bersama. Demikian juga tatkala isteri bersikap sebaliknya tidak melaksanakan kewajibannya, maka segala hasil rumah tangganya akan menjadi harta bersama hanya karena keterikatan dalam perkawinan.

### **C. Materi Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Bersama**

Aturan Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama sebagaimana tertuang dalam bab XIII, pasal 85 hingga pasal 97, sebagai berikut:

#### **Pasal 85**

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

#### **Pasal 86**

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

#### **Pasal 87**

1. Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.

#### **Pasal 88**

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.



### Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

### Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

### Pasal 91

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
1. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
2. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
3. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

### Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

### Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

### Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.



### Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pada pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

### Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

### Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal-pasal yang diungkapkan di atas merupakan pokok-pokok hukum harta bersama. Masing-masing pasal berkaitan satu sama lain. Berikut ini, penulis akan mendeskripsikan tafsir pasal-pasal dimaksud dalam kerangka penjelasan makna aturan hukum harta bersama.

Pasal 85 pada dasarnya mempertegas bahwa eksistensi harta bersama bukan berarti menafikan eksistensi harta pribadi suami isteri dan lebih dipertegas lagi oleh pasal 86 dengan ketentuan bahwa perkawinan tidak menyebabkan adanya percampuran harta bawaan suami dan isteri. Masing-masing pihak, suami atau isteri berhak untuk menguasai harta bawaan mereka masing-masing



secara penuh. Selanjutnya, pasal 87 lebih memperjelas bahwa harta bawaan dimaksud dapat bersumber dari warisan atau hadiah. Keberadaannya di bawah pengawasan masing-masing, kecuali ada perjanjian tertentu antara suami dan isteri.

Selanjutnya pasal 88 mempertegas proses penyelesaian perselisihan harta bersama. Proses awal yang dilakukan adalah mengajukan permasalahan yang ada ke Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama ditempuh dengan mengajukan gugatan. Gugatan harta bersama selain diajukan secara terpisah, juga dapat digabung dengan gugatan perceraian (kumulasi objektif). Secara praktis dan rasional dapat diselesaikan bersamaan dengan cara mendudukkan gugat pembagian harta bersama sebagai gugat *assessor* terhadap gugat perceraian. Jika gugat perceraian ditolak, otomatis gugat pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelyk verhaard*). Namun jika gugat perceraian dikabulkan, terbuka pula kemungkinan mengabulkan pembagian harta bersama sepanjang barang-barang yang diajukan dalam gugatan dapat dibuktikan sebagai harta bersama. Hal ini diatur dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 66 ayat (1). Sistem gugatan penggabungan adalah demi terciptanya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Harahap, *Kedudukan*, h. 293.



Selanjutnya, pasal 89 Kompilasi Hukum Islam bertujuan memberikan penegasan terhadap kewajiban suami untuk bertanggung jawab terhadap harta bersama, demikian juga halnya terhadap harta isteri maupun hartanya sendiri. Disamping itu, isteri juga mendapatkan amanah untuk membantu suami dalam mempertanggungjawabkan harta bersama, maupun harta suaminya sendiri. Hal ini merupakan makna eksplisit dari pasal 90.

Selanjutnya pasal 91 merupakan klasifikasi harta bersama kepada dua bentuk, yakni harta benda berwujud (benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga) dan benda tidak berwujud (hak dan kewajiban). Pada pasal ini, ditegaskan pula bahwa harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan terhadap berbagai perjanjian yang dilakukan. Baik suami maupun isteri harus sama-sama mengetahui dan menyetujui keberadaan harta bersama apabila dalam status sebagai jaminan. Kemudian, bila dikaitkan dengan proses perpindahan tangan harta bersama, ditegaskan dalam pasal 92 harus sepengetahuan dan seizin kedua belah pihak.

Kemudian, satu hal logis berkaitan tentang hutang piutang keluarga dijelaskan pada pasal 93. Pada pasal ini dinyatakan bahwa baik suami maupun isteri bertanggung jawab atas hutang masing-masing. Selanjutnya apabila hutang dimaksud untuk kepentingan keluarga, maka penyelesaiannya dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.



Pada pasal 94, ditegaskan bahwa bentuk harta bersama dalam perkawinan serial atau perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Aturan ini sejalan dengan ketentuan hukum adapt dan pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Asas dalam perkawinan serial atau poligami adalah terbentuknya beberapa harta bersama sebanyak isteri yang dikawini suami. Terbentuknya masing-masing harta bersama setiap isteri dihitung sejak tanggal berlangsungnya perkawinan dan masing-masing harta bersama terpisah dan berdiri sendiri.<sup>36</sup>

Bila pasal 94 mengatur perihal harta bersama dan kaitannya dengan perkawinan serial atau poligami, pasal 95 mengatur tentang sita jaminan terhadap harta bersama tanpa permohonan gugatan cerai yang dapat dilakukan bila suami atau isteri melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keberadaan harta bersama. Contoh-contohnya pun diungkapkan dalam pasal tersebut, seperti halnya mabuk, boros, dan lain sebagainya. Disamping itu, pasal ini menegaskan pula bahwa selama sita jaminan berlaku, penjualan terhadap harta bersama dapat dilakukan bila untuk kepentingan keluarga yang bersangkutan, dengan catatan harus berdasarkan izin Pengadilan Agama yang bersangkutan terlebih dahulu.

Selanjutnya pasal 96 dan 97 menjelaskan kedudukan harta bersama apabila salah satu pihak, baik suami ataupun isteri, meninggal dunia, demikian pula halnya apabila terjadi cerai hidup. Pada pasal 96 dijelaskan bila salah seorang di antara suami isteri meninggal dunia, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pasal 96 juga menjelaskan posisi

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 313.



harta bersama apabila salah seorang pasangan suami isteri hilang. Bila hal ini terjadi, maka harta harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya secara hakiki atau secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Sementara itu, pasal 97 lebih khusus menjelaskan posisi harta bersama bila suami isteri cerai hidup. Pada pasal ini ditegaskan bahwa masing-masing pihak berhak mendapat seperdua dari harta bersama, kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan.

